

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 7



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita : Kabupaten Banyumas

Dana Desa Se-Kabupaten Banyumas Terancam Molor

<http://radarbanyumas.co.id/dana-desa-se-kabupaten-banyumas-terancam-molor/>

Karena Enam Kecamatan Belum Laporan

PURWOKERTO-Pencairan Dana Desa (DD) tahap II tahun 2017 yang direncanakan cair Bulan Agustus ini terancam molor. Pasalnya, pencairan dana sebesar Rp 102.239.820.800 atau 40 % dari total anggaran tersebut, terkendala proses administrasi sejumlah kecamatan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas, dari 23 kecamatan (diluar kecamatan eks kotip), baru 17 kecamatan yang telah mengumpulkan laporan DD, sedangkan enam lainnya belum mengumpulkan. Padahal laporan tersebut, sebagai syarat pengambilan DD tahap berikutnya di Kementerian.

"Dari enam kecamatan, sebenarnya lima kecamatan sudah mengumpulkan, yakni Kecamatan Banyumas, Lumbir, Kebasen, Karang Lewas dan Sumbang, tapi ada data yang kurang jadi dikembalikan. Sedangkan Kecamatan Rawalo, kata Pak Camatnya sudah mengumpulkan tapi ke Pemerintahan Desa, bukan ke sini. Jadi kita anggap belum mengumpulkan," jelas Kepala Bidang Penagihan dan Administrasi Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas, Maryono SE, Senin (28/8).

Maryono mengatakan, belum seluruhnya kecamatan mengumpulkan laporan tersebut membuat pencairan DD dari kementerian terhambat. Sebab, salah satu syarat pengambilan dana di kementerian adalah menyertakan laporan penggunaan DD dari seluruh desa yang dikoordinir oleh kecamatan.

"Tentu menghambat pencairan, karena dari pusat harus semua desa sudah melaporkan. Kasian yang sudah melaporkan tapi harus menunggu. Mestinya paling cepat berdasarkan Peraturan Menteri PMK Nomor 50, bisa dicairkan Agustus," ujarnya.

Tidak hanya itu, kondisi tersebut juga diperparah karena belum optimalnya penyerapan DD di masing-masing desa. Faktanya masih ada beberapa desa yang penyerapan DD tahap sebelumnya masih dibawah 75% dan outputnya dibawah 50%. Padahal, menurut Maryono penyerapan tersebut sebagai syarat pengambilan DD di kementerian.

"Syarat pengambilan DD tahap II sebenarnya yang pertama pencairan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas masing-masing Desa (RKD) minimal sudah 90 persen. Dan di Banyumas sudah 100 persen pada Mei lalu. Dan syarat berikutnya adalah laporan penggunaan dana desa yang dikoordinir kecamatan minimal sudah 75 persen, dan outputnya 50 persen. Tapi di Banyumas masih ada beberapa desa yang belum memenuhi syarat," ujarnya.

Untuk memenuhi persyaratan tersebut dan mempercepat pencairan DD, Maryono mengatakan pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada pemerintah desa melalui kecamatan.

"Awal September kejar sosialisasi. Sehingga paling lambat tanggal 10 September sudah memenuhi syarat semua, dan pertengahan bisa diusulkan ke pusat. Paling lambat akhir September sudah cair," katanya. (why/ttg)